

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN PURWAHARJA KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR

Maulida Taufiqurrohman

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: rvlzmvta8z@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal, Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa indikator masalah, yaitu: PLKB tidak menyampaikan informasi tentang program KB dengan baik, kurangnya sosialisasi tentang program keluarga berencana kepada masyarakat, kurang tepatnya dalam mengimplementasikan program, fasilitas alat untuk memasang alat kontrasepsi dan sarana pendukung seperti listrik tidak memadai, imbalan yang diterima oleh PLKB tidak sesuai, serta Standar Operasional Prosedurnya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kejelasan komunikasi yang disampaikan pelaksana, kurangnya PLKB memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten, kurangnya penempatan dalam ketersediaan waktu yang tepat dan patuh terhadap peraturan, kurangnya ketersediaan anggaran, kurangnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya semangat pelaksana serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum optimal.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Program Kampung KB*

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa

pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47 menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang dapat langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung Keluarga Berencana.

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB (Keluarga Berencana) merupakan satu diantara kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima masyarakat. Untuk itu segera dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB. Program KB tidak lagi hanya fokus pada upaya pengendalian

jumlah penduduk, namun juga bagaimana melalui Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, KB dipandang masih dibutuhkan untuk memenangkan persaingan global. Kampung KB dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program Keluarga Berencana, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Komunikasi yang kurang baik dan tidak konsisten dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Seperti pada wawancara di lapangan dengan Ketua Kampung KB Harmoni Sejati Kelurahan Purwaharja. Ia mengatakan “Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu berbeda-beda seperti pada kualitasnya. Terdapat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia dalam menanggapi informasi. Informasi tersebut dari PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) mengenai program KB. Ketika di lapangan, beberapa Kader ditugaskan untuk berkumpul dan menyimak apa yang disampaikan oleh para PLKB serta menyampaikan informasi kembali apa yang disampaikan oleh PLKB dan disampaikan kembali kepada masyarakat. Dalam hal tersebut tampak ada yang paham dan ada yang kurang paham.”

Selain dari pada komunikasi, yang mempengaruhi pada implementasi program kampung KB selanjutnya ialah mengenai sumber daya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut informan dari Ketua Kampung KB dan PLKB ketika di wawancara, sumber daya di kelurahan purwahaarja sulit dalam membantu merealisasikan program Kampung KB. Seperti swadaya masyarakat yang kurang dalam mensukseskan kampung KB. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya peralatan.

Peran masyarakat begitu penting, tetapi peran dari pemerintah juga tentunya sangat diperlukan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti pada wawancara dengan informan PLKB kelurahan purwahaarja, mereka mengatakan “Tentu dalam hal implementasi program kampung KB ini peran pemerintah juga sangat diperlukan. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa membantu dikarenakan keterbatasan pengetahuan di bidang anggaran yang ada. Pada pembangunan kampung KB Harmoni

Sejati di wilayah wargamulya kelurahan purwahaarja, kami hanya mengandalkan kemampuan seadanya dan juga dari partisipasi masyarakat yang ingin membantu. Sedangkan pemerintah kelurahan yang memiliki tanggung jawab dalam program kampung KB ini kurang memberikan kontribusinya, seperti dalam hal anggaran sangat sulit diminta. Padahal itu bagian penting dari salah satu dalam merealisasikan dan mensukseskan program kampung KB” Dalam hal ini tampak sangat buruk peran dari pemerintah kepada program kampung KB, kurangnya intervensi atau perhatian dari pemerintah sehingga program Kampung KB kurang berjalan dengan baik.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, tetapi implementasi kebijakan bisa jadi masih belum bisa dikatakan efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dan sebagainya. Karakteristik utama dari birokrasi yaitu SOP (*Standard Operational Procedure*) dan fragmentasi. Ketika kedua karakteristik tersebut terlihat masih buruk dan belum jelas, tentu akan mempengaruhi pada

jalannya keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Kelurahan Purwaharja sendiri resmi menjadi kelurahan yang terpilih menjalankan Program Kampung Keluarga Berencana sejak tahun 2010. Namun sejak berjalan kurang lebih 10 tahun belum ada perubahan signifikan yang terlihat dari adanya Kampung Keluarga Berencana tersebut, selain itu orang-orang yang ditempatkan menjadi pengurus Program Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Purwaharja masih terdapat ada yang belum memahami tentang Kampung Keluarga Berencana itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar masih belum optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator, sebagai berikut:

1. PLKB tidak menyampaikan informasi tentang program KB dengan baik. Hal ini terlihat dalam menyampaikan informasi kepada beberapa kader posyandu mengenai program KB. Seperti tampak ada kader posyandu yang paham dan ada yang kurang paham untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi tentang program keluarga berencana kepada masyarakat. Karena terbatasnya waktu, banyaknya pekerjaan, serta adanya pandemi

COVID-19 maka mengakibatkan penyuluh KB tidak bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan kader posyandu untuk menyampaikan tentang program KB. Sehingga masyarakat masih banyak yang kurang paham mengenai program KB.

3. Kurang tepatnya dalam mengimplementasikan program kampung keluarga berencana. Program kampung KB ini direalisasikan untuk memudahkan pelayanan KB, tetapi saat direalisasikannya tidak dipersiapkan dengan tepat. Seperti pelayanan KB tidak bisa dilaksanakan di wilayah kampung KB, tapi harus di tempat pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit.
4. Fasilitas alat untuk memasang alat kontrasepsi seperti IUD Kit, Implan Kit serta sarana pendukung seperti listrik yang tidak memadai. Hal ini terlihat dalam pelayanan KB di kampung KB Harmoni Sejati. Seperti pada saat pelayanan KB, masyarakat merasa kurang nyaman dengan lingkungan tempat pelayanan KB, yang disebabkan karena lokasinya yang padat penduduk dan lokasinya yang masih terbuka.
5. Imbalan yang diterima oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh

Pemerintah. Hal ini berakibat dari banyaknya tugas dari pemerintah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan mengakibatkan kurangnya semangat kerja dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program.

6. Standar Operasional Prosedurnya masih belum optimal. Hal ini terlihat pada perencanaan dan pelaksanaan program Kampung KB yang tidak tertata dengan baik, sehingga implementasi program kampung KB tidak berjalan lancar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kelurahan Purwaha Kecamatan Purwaha Kota Banjar?”

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:146).

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks

yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2012:147).

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sementara itu, Grindle (Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Edward III (Agustino, 2016:136) terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang, yang terdiri dari Kasi Advokasi dan

pendayagunaan DPPKB BKKBN Kota Banjar (1 orang), Lurah Kelurahan Purwaharja (1 orang), Sekretaris Kelurahan Purwaharja (1 orang), Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Purwaharja (1 orang), PLKB Kecamatan Purwaharja (2 orang), Ketua Kampung KB Harmoni Sejati Kelurahan Purwaharja (1 orang), serta Akseptor KB atau Masyarakat Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar (2 orang). Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ditinjau berdasarkan 4 (empat) dimensi dari model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Agustino, 2016:136), yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

a. Media komunikasi dalam memudahkan informasi tentang program KB

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa media komunikasi itu sendiri dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam artian penyaluran komunikasi tersebut sudah berjalan optimal. Karena penyaluran komunikasi secara langsung berupa penyuluhan atau

sosialisasi yang dilakukan di balai sawala Kampung KB Harmoni Sejati dengan melakukan pertemuan dengan kader-kader atau akseptor. Kemudian untuk secara tidak langsungnya yaitu dengan menggunakan aplikasi komunikasi di android dan media-media pendukung lainnya seperti media cetakan dan dokumen. Seperti dalam komunikasi menyampaikan program KB atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana melakukan pertemuan dengan kader-kader atau akseptor di balai sawala kampung KB Harmoni Sejati. Sedangkan secara tidak langsungnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana menyampaikan informasi melalui grup WhatsApp, dokumen-dokumen, serta banner/spanduk.

van Metter & van Horn (Agustino, 2016:133) menyatakan bahwa:

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, media komunikasi dalam memudahkan informasi tentang program KB oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana

di Kelurahan Purwahaerja Kecamatan Purwahaerja Kota Banjar pada prinsipnya sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh van Metter & van Horn. Karena media komunikasi dalam memudahkan informasi tentang program KB sejauh ini sudah berjalan lancar dengan melalui penyaluran komunikasi yang dilakukan secara 2 arah dari media komunikasi yang digunakan oleh PLKB sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang program KB. Maka dari itu, media komunikasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif. Semakin baik dikembangkan saluran-saluran komunikasi untuk meneruskan perintah-perintah implementasi, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah ini diteruskan dengan benar.

b. Kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh para pelaksana Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi untuk program kampung keluarga berencana itu sendiri memang kurang cukup jelas apa yang disampaikan oleh pelaksana. Seperti dalam memberikan informasi tentang program KB, banyak dari masyarakat yang masih kebingungan dan tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Beberapa dari mereka ada yang menanyakan kembali apa itu yang dikatakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Sehingga informasi apa yang

disampaikan tidak dapat dipahami oleh kader-kader atau akseptor dengan baik. Dengan melihat tingkat pendidikan kader-kader atau akseptor di kelurahan purwahaerja begitu berbeda-beda. Kemudian komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana harus benar-benar dilakukan secara detail agar kader-kader atau akseptor tidak kebingungan dengan kata-kata atau bahasa yang disampaikan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Grindle (Agustino, 2016:143) menyatakan bahwa:

Setiap kebijakan mempunyai target hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Dengan demikian, kejelasan komunikasi khususnya dalam penyampaian program KB yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwahaerja Kecamatan Purwahaerja Kota Banjar belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Grindle. Karena kejelasan komunikasi yang disampaikan kepada kader-kader atau akseptor sejauh ini belum jelas sehingga masyarakat di Kelurahan Purwahaerja masih kurang paham mengenai program KB meskipun saluran-saluran komunikasi yang telah dikembangkan berjalan baik. Maka dari itu, kejelasan komunikasi yang

diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. PLKB memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten tentang program KB

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan konsisten tentang program KB oleh PLKB itu sendiri yaitu dengan cara sosialisasi atau penyuluhan langsung. Namun kegiatan tersebut menjadi kurang efektif karena selain terhambat oleh pandemi covid-19 juga diakibatkan oleh waktu yang terbatas dan banyaknya pekerjaan membuat kegiatan sosialisasi tersebut dibatasi, sehingga kurangnya sosialisasi menyebabkan pemahaman masyarakat tentang program KB menjadi kurang baik. Seperti dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program KB yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana mengadakan pertemuan dengan kader posyandu atau akseptor di balai sawala Kampung KB Harmoni Sejati tidak dapat dilaksanakan, karena kebijakan dari pemerintah yang membatasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Sehingga kegiatan sosialisasi tersebut tidak berjalan efektif dan konsisten.

Agustino (2016:161) mengatakan bahwa:

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi

kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

Dengan demikian, PLKB memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten tentang program KB dalam program Kampung KB oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Agustino. Karena memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten itu pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Maka dari itu, apabila PLKB memberikan informasi secara tepat, akurat dan konsisten dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentu mereka akan dapat memahami dan mengerti tentang program KB.

2. Sumber daya

a. Tersedianya Petugas Lapangan yang berkompeten dan kapabilitas

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa untuk menjalankan program kampung KB di wilayah Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar itu sendiri jumlahnya sudah memadai dan kompeten meskipun basic dari petugas KB tersebut bukan asli dari BKKBN,

juga untuk jumlah karena memang aturan atau perintah dari Dinas Kependudukan Kota Banjar hanya menugaskan satu orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk bertugas di satu wilayah kelurahan. Seperti jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja hanya 1 orang akan tetapi kecakapan dan kemampuannya dalam menyampaikan program KB cukup mahir dan menguasainya sehingga tidak kesulitan dalam menyampaikan program KB kepada kader-kader atau akseptor di balai sawala Kampung KB Harmoni Sejati ataupun di dalam grup whatsapp.

Menurut van Metter & van Horn (Agustino, 2016:133)

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Dengan demikian, bahwa untuk indikator tersedianya Petugas Lapangan yang berkompeten dan kapabilitas dalam Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh van Metter & van Horn. Karena petugas lapangan sudah memadai atau mencukupi kebutuhan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program Kampung Keluarga Berencana.

b. Tersedianya waktu yang tepat dan patuh terhadap peraturan dalam mengimplementasikan program

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa untuk ketersediaan waktu dalam pengimplementasian program itu sendiri memang sudah sangat tepat, karena program KB itu dituntut untuk mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk pembuatan Kampung KB ini direalisasikan untuk memudahkan pelayanan KB kepada masyarakat, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dipersiapkan dengan baik seperti dalam hal anggaran yang tidak mencukupi dan mengandalkan swadaya masyarakat, sehingga sarana dan prasarana tidak memadai. Hal tersebut berimbas pada pelayanan KB yang tidak bisa dilaksanakan di wilayah kampung KB, tapi harus di tempat pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit karena di kampung KB

Harmoni Sejati belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pemasangan alat kontrasepsi IUD Kit dan Implant Kit. Kemudian waktu untuk menyampaikan program KB tidak cukup tersedia, karena banyaknya pekerjaan lain dan kondisi yang masih pandemi mengakibatkan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

van Metter & van Horn (Agustino, 2016:133) menyatakan bahwa:

Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Dengan demikian, bahwa ketersediaan waktu dalam mengimplementasikan Program Kampung Keluarga Berencana oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh van Metter & van Horn. Meskipun waktu dalam pengimplementasian program itu tepat karena bertujuan untuk mengentaskan lajunya pertumbuhan penduduk, akan tetapi masih terdapat kekurangan dan keterbatasan seperti belum sinkronnya waktu yang diharapkan untuk pelayanan KB dan penyampaian program KB. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan program

mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung, beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya.

c. Tersedianya anggaran agar perintah dapat dilaksanakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa anggaran untuk Program Kampung Keluarga Berencana belum optimal, hal itu terlihat anggaran untuk Program Kampung Keluarga Berencana itu sendiri tidak bisa ditentukan dengan baik, tetapi harus dimaksimalkan sebaik mungkin oleh pelaksana program Kampung Keluarga Berencana. Sehingga saat diimplementasikan masih terdapat kekurangan, dengan mengandalkan swadaya masyarakat untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan. Anggaran yang begitu minim dari pemerintah membuat sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan program tidak memadai, terlihat dalam pelayanan KB di kampung Keluarga Berencana Harmoni Sejati peralatan untuk pemasangan alat kontrasepsi belum tersedia. Selain itu saat pelayanan KB masyarakat merasa kurang nyaman dengan lingkungan tempat pelayanan KB, yang disebabkan karena lokasinya yang padat penduduk dan lokasinya yang masih terbuka. Kemudian anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan program KB lainnya yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di balai sawala Kampung KB Harmoni Sejati menjadi

terhambat karena minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

van Metter & van Horn (Agustino, 2016:134) menyatakan bahwa:

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Dengan demikian, bahwa anggaran dalam program Kampung Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada prinsipnya belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh van Metter & van Horn. Meskipun ketersediaan anggaran tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah akan tetapi kurang mencukupi dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dalam mendukung keberhasilan program-program terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana di kampung KB Harmoni Sejati, tetapi dengan anggaran yang tersedia sedikitnya sangat memberikan kontribusi terhadap implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana agar tetap berjalan dengan baik.

d. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa fasilitas sarana dan prasarana memang belum memadai sepenuhnya. Terutama dalam pelayanan KB, fasilitas alat untuk memasang alat kontrasepsi seperti IUD Kit, Implan Kit serta sarana pendukung seperti listrik belum memadai. Sehingga pelayanan pemasangan alat kontrasepsi tidak dapat dilaksanakan di Kampung KB Harmoni Sejati, tetapi masih bekerja sama dengan Puskesmas dan RSUD. Kemudian dalam pelayanan KB di kampung KB Harmoni Sejati terlihat juga masyarakat merasa kurang nyaman dengan lingkungan tempat pelayanan KB dikarenakan lokasinya yang padat penduduk dan masih terbuka.

Grindle (Agustino, 2016:144) menyatakan bahwa “Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik”.

Dengan demikian, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Grindle. Pengadaan sarana dan prasarana memang sudah diupayakan sebaik mungkin, meskipun masih terdapat

kekurangan dan juga keterbatasan. Dengan demikian, fasilitas untuk pelayanan KB kepada masyarakat di Kampung Keluarga Berencana Harmoni Sejati masih dalam tahap peningkatan.

3. Disposisi

a. Bersikap tegas dalam mengimplementasikan program

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa bahwa Petugas Lapangan Keluarga Berencana selalu tegas dalam mengambil sikap ataupun tindakan, dimana Petugas Lapangan Keluarga Berencana itu sendiri memang memiliki integritas yang cukup baik. Pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap suatu kebijakan, sehingga pelaksanaan program-program bisa berjalan. Seperti dalam penyampaian program KB di Kampung KB Harmoni Sejati kepada kader-kader atau akseptor cukup tegas tidak gugup. Kemudian dalam pelayanan KB dalam penyesuaian tempat selalu mengambil tindakan yang cukup baik dan tidak membingungkan akseptor.

Menurut van Metter & van Horn (Agustino, 2016:134) menyatakan bahwa:

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri

yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, bahwa ketegasan pelaksana dalam mengimplementasikan program dalam program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh van Metter & van Horn. Karena sejauh ini Petugas Lapangan Keluarga Berencana memiliki integritas yang baik seperti dalam penyampaian program KB cukup tegas dan tidak ada keraguan.

b. Pelaksana memiliki keahlian dan berkompeten

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa untuk indikator pelaksana memiliki keahlian dan berkompeten dalam program Kampung Keluarga Berencana sudah cukup baik, karena Petugas Lapangan Keluarga Berencana itu sendiri memang sering mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun berupa seminar tentang program KB supaya bisa meningkatkan keahliannya dalam mengimplementasikan program. Seperti dalam penyampaian program

KB di Kampung KB Harmoni Sejati dengan kader-kader atau akseptor, kecakapan dan kemampuannya cukup ahli dan mahir dalam menjelaskan program KB tersebut.

Grindle (Agustino, 2016:144) menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

Dengan demikian, bahwa untuk indikator pelaksana memiliki keahlian dan berkompeten dalam program Kampung Keluarga Berencana oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Grindle. Meskipun sudah cukup baik, namun kemampuan pengetahuan perlu ditingkatkan agar lebih mudah lagi memahami secara mendalam tentang pengimplementasian program baru dan capaian-capaian program yang relatif lebih cepat dengan sering mengikuti pelatihan-pelatihan/seminar ataupun bimbingan teknis.

c. Adanya semangat pelaksana dalam mengimplementasikan program

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa semangat pelaksana untuk Program Kampung Keluarga Berencana itu

sendiri memang kurang optimal. Imbalan yang diterima oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini berakibat dari banyaknya tugas yang diberikan oleh pemerintah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, mengakibatkan kurangnya semangat kerja dalam mengimplementasikan program. Terlihat seperti dalam pelayanan KB dan penyampaian program KB di Kampung KB Harmoni Sejati kurang semangat atau kurang bergairah sehingga pelaksanaannya kurang optimal.

Sebagaimana menurut van Metter & van Horn (Agustino, 2016:135) menyatakan bahwa:

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Dengan demikian, bahwa untuk indikator semangat pelaksana dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berencana oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada prinsipnya belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh van Metter & van Horn. Meskipun pemerintah sudah memberikan hasil sebaik mungkin untuk pencapaian Petugas Lapangan Keluarga Berencana, akan tetapi hasil yang diberikannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana, sehingga kurangnya semangat dalam menjalankan program.

4. Struktur birokrasi

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam mengimplementasikan program

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa Standar Operasional nya masih belum optimal. SOP tersebut baru tahap perencanaan kegiatan sehingga pelaksanaan program Kampung KB belum tertata dengan baik. Hal itu terlihat dari advokasi kepada RT/RW, tokoh formal dan informal. Seperti kurangnya memberikan informasi dan data yang akurat tentang program Kampung KB kepada para tokoh-tokoh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu Kampung KB.

Menurut Warwic (Kadji, 2015:71) menyatakan bahwa:

Dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Prosedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, bahwa untuk indikator Standar Operasional Procedur (SOP) dalam mengimplementasikan program yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Warwic dan Winarno. SOP baru sampai perencanaan kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB Harmoni Sejati kepada kader dan masyarakat setempat. Kemudian advokasi kepada RT/RW, tokoh formal dan informal kurang optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kampung KB.

b. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab itu sendiri sudah ada. Terlihat pembagian tugas dan tanggung jawab sudah terstruktur mulai dari catatan kegiatan dan struktur kepengurusan sudah terpampang di kampung KB Harmoni Sejati. Meskipun dalam pelaksanaannya apabila ada permasalahan yang timbul selalu dibantu penyelesaiannya secara bersama-sama dengan petugas KB lain.

Menurut Warwic (Kadji, 2015:71) mengatakan bahwa:

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Dengan demikian, bahwa untuk indikator pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sudah sesuai

dengan apa yang dinyatakan oleh Warwic. Karena tugas dan tanggung jawab merupakan tugas utama dalam sebuah jabatan. Adanya struktur kepengurusan dan catatan kegiatan di Kampung KB Harmoni Sejati, dengan begitu dapat mendorong para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi bidangnya masing-masing, sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan program.

KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum berjalan dengan efektif, masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh para pelaksana, kurangnya PLKB memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten tentang program KB, kurangnya penempatan dalam ketersediaan waktu yang tepat dan patuh terhadap peraturan dalam mengimplementasikan program, kurangnya ketersediaan anggaran agar perintah dapat dilaksanakan, kurangnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya semangat pelaksana dalam mengimplementasikan program serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam mengimplementasikan program yang

belum optimal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, Petugas Lapangan Keluarga Berencana melakukan upaya-upaya seperti Petugas Lapangan Keluarga Berencana berusaha menyampaikan program secara berulang-ulang, menggali materi yang bisa dipahami oleh masyarakat, menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang tidak asing, mengoptimalkan waktu agar pelaksanaan program kondusif dan konsisten, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, bekerja sama dengan Puskesmas atau RSUD sebagai tempat pemasangan alat kontrasepsi, berusaha untuk mengambil sikap profesional dan bertanggung jawab, serta melakukan pendekatan advokasi kepada pemangku kebijakan di kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahaya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulya, Deddy. 2015. *Study kebijakan dan pelayanan publik: konsep dan aplikasi proses kebijakan & pelayanan publik*. Bandung:Alfabeta.

Sore, et al. 2017. *Kebijakan publik*. Makassar: CV Sah Media.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

E-Book

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, [e-book], diakses tanggal 27 Oktober 2018, dari Universitas Negeri Gorontalo.

Jurnal Ilmiah

Ramadhani, Nur Fitria dan Tukiman. 2020. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Public Administration Journal of Research, 2(4), 58-65. <http://paj.upnjatim.ac.id/index.php/paj/article/view/65>. (diakses 06 November 2020).

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.